

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pelaksanaan pembangunan daerah yang intinya merupakan integral dari pembangunan nasional yang mempunyai tujuan mengembangkan dan melestarikan pertumbuhan di masing-masing daerah Indonesia, dalam pengembangan dengan potensi lokal di butuhkan peningkatkan penggunaan secara optimal. Kesadaran terhadap sektor pariwisata menjadi sesuatu yang penting bagi pemerintah di setiap daerah.

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Pariwisata, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan lingkungan serta berbagai fasilitas serta layanan yang di sediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Selanjutnya juga di terangkan dalam pasal 1 ayat 4 tentang Kegiatan Keperiwisataan, yang merupakan suatu rangkaian kegiatan kebebasan seseorang dalam melakukan suatu perjalanan dan memanfaatkan waktu luang dalam wujud berwisata yang merupakan bagian dari hak asasi manusia.

Berbicara tentang pengembangan ekowisata adalah salah satu berbicara tentang masyarakat sebagai subjek. Ekowisata tanpa ada partisipasi masyarakat merupakan suatu hal yang keliru. (Mohan & Stokke, 2000)“ekowisata merupakan salah bentuk pembangunan yang bersifat

partisipatif, terutama dari masyarakat lokal. Ekowisata pertama kali di terima secara luas adalah definisi

**Tabel 1.1 Dampak Wisata Dalam Suatu Masyarakat**

No.	POSITIF (Dengan Partisipasi Masyarakat)		NEGATIF (Tanpa Partisipasi Masyarakat)	
	Bagi masyarakat	Bagi kawasan	Bagi masyarakat	Bagi kawasan
1.	Pendapatan berkelanjutan	Ancaman berkurang dan pembangunan ekonomi sesuai	Hilangnya basis sumber daya alam	Ketidaksesuaian pembangunan ekonomi
2.	Perbaikan layanan	Ancaman berkurang dan pembangunan ekonomi sesuai	Meningkatnya ketidakadilan ekonomi	Perambahan, penggunaan sumber daya secara berlebihan
3.	Pemberdayaan budaya	Ancaman berkurang dan pembangunan ekonomi sesuai	Pengikisan nilai-nilai budaya	Hilangnya kearifan lokal

*Potensi Dampak Wisata dalam Suatu Masyarakat (Drumm & Moore, 2015:42)*

Dari tabel di atas menegaskan bahwa partisipasi masyarakat lokal merupakan salah satu komponen berkelanjutan dan khususnya pada sektor ekowisata. Dalam hal partisipasi masyarakat akan berdampak positif dan negatif bagi masyarakat, partisipasi yang baik (*Positif*) dilakukan oleh masyarakat akan berdampak kepada pendapatan yang berkelanjutan, dan pemberdayaan budaya, sehingga akan terdapatnya perbaikan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah setempat dan dengan ini akan mengurangi ancaman di kawasan ekowisata serta akan sesuainya pembangunan ekonomi. Dan sebaliknya, partisipasi yang buruk (*negatif*) atau ketika tanpa adanya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan maka berbagai hal yang akan menyebabkan ketimpangan di masyarakat itu sendiri, misalnya hilangnya

basis sumber daya alam sehingga terjadinya ketidak sesuaian pembangun ekonomi, serta akan meningkatnya ketidakadilan ekonomi yang mengakibatkan, pembangunan sumber daya secara berlebihan dan akan terdajinya pengikisan pada nilai-nilai budaya setempat yang mana akan hilangnya kearifan budaya lokal. Sehingga dalam hal ini dalam pengelolaan ekowisata sangat membutuhkan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan masyarakat.

Pengembangan ekowisata berdasarkan pada Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS), yaitu Pembangunan kepariwisataan di Indonesia meliputi destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industry pariwisata, dan kelembagaan pariwisata yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS). Dalam peraturan ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan arah pembangunan kepariwisataan nasional dalam kurun waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2025, dan Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia no 14 tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan, yang mana bahwa pembangunan kepariwisataan bertumpu pada keanekaragaman, keunikan dan kekhasan budaya dan alam dengan tidak mengabaikan kebutuhan masa yang akan datang, sehingga diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi yang membawa manfaat pada kesejahteraan masyarakat. Dalam mencermati dampak positif ekowisata dalam peningkatan daya saing pariwisata sehingga di butuhkan pengembangan ekowisata Daerah yang berbasiskan masyarakat

untuk memperbaiki kondisi lingkungan, baik dengan melakukan upaya konservasi, reboisasi, penanaman di dalam kawasan ekowisata dan peningkatan *capacity bulding* pengelola ekowisata yang melibatkan masyarakat, pemerintahan dalam pembangunan ekowisata. Sehingga upaya dalam peningkatan *capacity bulding* pengelolaan ekowisata dapat di harapkan dengan terwujudnya kawasan ekowisata yang memiliki daya tarik dan mengedepankan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan serta penguatan kelembagaan dan pemeberdayaan masyarakat lokal dalam mengelola dan mengembangkan kawasan ekowisata.

**Tabel 1.2 Jumlah Kunjungan Wisatawan di Provinsi Jawa Tengah 2013-2018**

Tahun	Wisatawan Mancanegara	Wisatawan Domestic	Jumlah
2013	388.143	29.430.609	29.818.752
2014	419.584	29.852.095	30.271.679
2015	375.166	31.432.080	31.807.246
2016	578.924	36.899.776	37.478.700
2017	781.107	40.118.470	40.899.577
2018	677.168	49.762.787	50.439.955

*Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga. dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah*

Data di atas dapat di lihat jumlah wisatawan mancanegara dan domestik dari tahun ke tahun mengalami peningkatan kedatangan wisatawan ke Jawa Tengah. Pada presentase di 2017 jumlah wisatawan yang berkunjung ke Jawa Tengah sebanyak 40,90 juta yang terdiri atas 781,11 ribu wisatawan asing dan 40,12 juta wisatawan domestik. Dan pada 2018 terdapat penurunan wisatawan asing yang datang ke Jawa Tengah yang mana hanya sebanyak 677.168 wisatawan, akan tetapi kedatangan wisatawan domestik mengalami kenaikan yang cukup tinggi sebanyak 49.76 juta wisatawan. Sehingga dalam data di atas menerangkan 2017-2018 mengalami kenaikan wisatawan sebanyak 50.43 juta wisatwan dan mengalami penurunan pada kedatang wisatawan asing.

Seperti halnya obyek wisata Kali Talang yang terletak di Desa Balarente Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten Jawa Tengah, wisata yang memiliki potensi wisata yang sangat menarik dan sangat berpotensi menjadi destinasi unggulan di Jawa Tengah. (<http://krjogja.com>) Obyek Wisata Kali Talang yang diresmikan pada tanggal 27 Februari 2017 Pelaksana Tugas Bupati klaten Sri Mulyani. Obyek wisata menawarkan keindahan alam Gunung Merapi yang terus berbenah dari sejak diresmikannya, dilihat dari data pengunjung yang terus meningkat sejak 25 Maret 2017 sampai 31 Maret terjadi peningkatan pengunjung yang mencapai 3.549 orang yang berdasarkan penghitungan jumlah tiket yang terjual. (<http://rri.co.id>) dari gambaran perkembangannya hingga 2018, peningkatan pengunjung obyek wisata terus mengalami kenaikan dimana di hari-hari libur

seperti libur nasional, jika pada hari biasa pengunjung hanya kisaran 30 sampai 40 orang sedangkan pada hari libur jumlah pengunjung mengalami kenaikan hingga mencapai 300 sampai 400 orang pengunjung dengan mayoritas kalangan anak muda yang berasal dari berbagai daerah Solo, Yogyakarta, dan Klaten.

Menurut (Nuryanti 2002:12) bahwa kebutuhan akan adanya kemitraan terkait dengan keberadaan masalah-masalah di dalam pembangunan pariwisata yang berkelanjutan yang terjadi karena adanya konflik keterlibatan antar sektor pemerintahan dan swasta, sehingga dalam rangka mencari keselarasan di antara keduanya perlu adanya titik temu antara peranan sektor publik, masyarakat dan swasta dengan mengkaji keterlibatan masing-masing sektor dan melihat tingkat keberhasilannya. Secara umum dapat di lihat bagaimana peran dan hubungan di antara ketiga pilar pendukung *governance* yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengelolaannya. Perspektif tersebut merupakan upaya untuk mengatasi kesenjangan yang ada dan sekaligus untuk capaian kebijakan.

Penulisan penelitian ini di latar belakang dengan kondisi wisata Kali Talang Desa Balerante yang merupakan obyek wisata yang berada dalam kawasan zona rehabilitasi Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM). Pembangunan dan Pengembangan wisata Balerante tidak hanya terbatas pada pembangunan Obyek Ekowisata Kali Talang, tetapi sebagai bagian dari upaya untuk peningkatan ekonomi lokal, peningkatan dari sumber daya manusia yang tersedia dan pelestarian ekosistem TNGM melalui kegiatan

pemanfaatan, konservasi dengan tanaman pelindung dan taman komoditas unggulan (sayuran, kopi, tanaman buah-buahan, rumput dan tanaman local). Konservasi merupakan bagian dari upaya pencegahan bencana alam (erupsi, longsong, banjir atau erosi).

Obyek Ekowisata Kali Talang sendiri masih terkendala dengan, kurangnya tingkat pengetahuan sumber daya manusia baik tentang ekowisata dan pengembangan ekowisata sehingga yang terjadi rendahnya partisipasi masyarakat. Dengan hal tersebut, tingginya tingkat penambangan pasir dan penggunaan bangunan yang tidak sesuai dengan fungsinya. Besarnya penambangan pasir yang terjadi yang mana merupakan lahan sauatuan lahan kegiatan ekonomi dalam mata pencarian bagi masyarakat di kawasan Kali Talang, sehingga merusak lingkungan contoh, terjadinya longsor dan banjir yang disebabkan berkurangnya penghalang material-material dari lahar hujan (lahar dingin) yang di sebabkan penggalian pasir secara berlebihan, dan pembangunan drainase saluran air ketika musim hujan di alihfungsikan menjadi tempat pembuangan sampah. Sehingga digambarkan terjadinya penambangan pasir dan pemanfaatan yang disalah fungsikan terhadap lahan atau pembangunan bangunan yang telah sediakan ini terjadi dikarenakan merupakan salah satu tempat atau wadah bagi masyarakat dalam memenuhi ekonomi kebutuhan hidup serta terjadinya dalam menyalah fungsikan pembangunan yang telah disediakan untuk kepentingan umum, hal ini disebabkan kurang teralokasikannya wadah, peluang dan pengetahuan yang

dapat menunjang untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik secara ekonomi, sosial, SDM untuk kesejahteraan masyarakat sendiri.

Pengembangan dalam upaya untuk menjaga kelestarian yang dilakukan dengan memberikan inovasi-inovasi terbaru kepada masyarakat seperti, pengembangan wisata yang tersedia (sprot selfi, trek sepeda, museum, dan produsen rumahan serta perkebunan kopi), dan membuat lokasi yang digunakan sebagai obyek wisata menjadi bagian partisipasi masyarakat dalam menjaga kawasan TNGM (tidak membuka lahan, memotong pohon, merubah lingkungan dan membahayakan) yang sejalan dengan pengembangan prinsip-prinsip ekowisata yang mana nantinya akan menunjang atau menaikkan perekonomian tanpa harus menambang pasir secara besar-besaran yang akan merusak lingkungan.

Dengan adanya permasalahan dan pengembangan ekowisata Kali Talang di Desa Balerante Klaten Jawa Tengah menjadi perhatian yang menarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Pengembangan Ekowisata Kali Talang Berbasis Masyarakat di Desa Balerante Klaten Jawa Tengah Tahun 2018”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian penjelasan yang terdapat di latar belakang adapun rumusan masalah yang akan diambil oleh peneliti adalah :

1. Bagaimana peran stakeholders dalam pengembangan ekowisata Kali Talang Berbasis Masyarakat di Desa Balerante Klaten Jawa Tengah?
2. Bagaimana pengembangan ekowisata Kali Talang di Desa Balerante Klaten Jawa Tengah yang berbasiskan masyarakat ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peran stakeholders dalam pengembangan ekowisata Kali Talang Berbasis Masyarakat di Desa Balerante Klaten Jawa Tengah.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang terjadi dalam upaya pengembangan ekowisata Kali Talang di Desa Balerante Klaten Jawa Tengah yang berbasiskan masyarakat.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Praktis**

#### **a. Pemerintah**

1. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat di jadikan sebagai acuan dan referensi bagi instansi terkait dalam penegembangan ekowisata Kali Talang di Desa Balerante Klaten Jawa Tengah yang berbasis masyarakat.
2. Sebagai masukan bagi Pemerintah Daerah Jawa Tengah dalam melakukan evaluasi strategi dalam meningkatkan perkembangan ekowisata sehingga berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Desa Balerante Klaten Jawa Tengah.

#### **b. Masyarakat**

1. Secara praktis penelitian ini bisa menjadi gambaran untuk mengetahui peran masyarakat dalam pengelolaan obyek wisata Kali Talang Desa Balerante Klaten Jawa Tengah.
2. Untuk menambah wawasan bagi masyarakat dalam ekowisata baik halnya dengan pengembangan strategi dan pengelolaan potensi-potensi wisata yang baru di Kali Talang.
3. Untuk membentuk masyarakat professional dan mampu bekerja keras baik dalam pengelolaan dan pengembangan ekowisata.

#### 1.4.2 Manfaat teoritis

- a. Sebagai bahan penelitian yang dapat memberikan kontribusi baik secara pemikiran dan penambahan ilmu pengetahuan dalam kajian ilmu pemerintahan, terutama dalam meningkatkan konsep ekowisata.
- b. Sebagai bahan untuk dapat memberikan kontribusi dalam kebijakan ekowisata tingkat nasional dan masyarakat professional yang sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan dan upaya penyusunan melalui konsultasi yang luas antara pihak-pihak yang terlibat didalamnya, dimana kontribusi ini akan mempengaruhi kegiatan-kegiatan wisata, terutama dalam penerapan konsep ekowisata.

#### 1.5 Tinjauan Pustaka

Penelitian ini diawali dengan melihat penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilaksanakan guna mencari persamaan dan perbedaan dalam penelitian yang akan dilaksanakan dan penelitian yang sudah ada.

**Tabel 1.3 Tinjauan Pustaka**

No	Judul Penelitian	Peneliti	Hasil
1	Skripsi tentang Pengelolaan Kali Talang Sebagai Daya Tarik Wisata Baru Di Kemalang Klaten Jawa Tengah.	(Dewi, 2018)	Penelitian ini bertujuan dalam memperkenalkan wisata baru yang terdapat di Jawa Tengah tepatnya di Klaten Desa Balerante, serta dalam penelitian menjelaskan pengelolaan wisata dimana efektif terhadap masyarakat yang sadar akan potensi wisata di daerah mereka dan bergotong royong untuk mengelola, namun belum ada peran dari pemerintah dalam mengelola.
2	Jurnal penelitian tentang,	(Made Heny Urnila Dewi,	Dalam penelitian ini menjelaskan terdapatnya pengembangan desa

	Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal di Desa Wisata. Jatiwulih Tabanan, Bali.	Chafid Fandel, 2013)	wisata Jatiwulih yang belum melibatkan masyarakat lokal yang mana peran pemerintah sangat terlihat dominan, pendekatan tata kelola pemerintah yang bersih dan berkelanjutan, pemerintah sebagai wadah yang menjadi fasilitator dan penyedia layanan, dan masyarakat sendiri diikuti sertakan dalam pengelolaan wisata yang tersedia di Desa. Sehingga akan terjadinya keselarasan hubungan antara pemerintah dan masyarakat desa.
3	Skripsi tentang, Analisis Kelayakan Potensi Ekowisata Pada Kawasan Wisata Alam Bungi Kecamatan Kokalukuna Kota BauBau.	(Maharani, 2016)	potensi ekowisata pada kawasan Wisata Alam Bungi Kecamatan Kokalukuna Kota BauBau dapat diketahui bahwa kawasan tersebut layak untuk dikembangkan dengan tingkat kelayakan yang dinyatakan berdasarkan kriteria kelayakan setiap kelas yang menunjukkan bahwa setiap kelas dinyatakan layak dengan skor masing - masing kelas.
4	Buku, Pengembangan Desa Melalui Ekowisata.	(Negara, Iwan Nugroho & Purnawan D, 2015 )	Materi buku ini membuat tentang pemahaman tentang hubungan pariwisata dan sektor penunjang serta menjelaskan tentang kehidupan desa dalam sapek sosial, ekonomi, dan lingkungan sebagai modal obyek, produk dan jasa wisata dan menjelaskan tentang ekowisata, kawasan konservasi, taman nasional dan pasar ekowisata.
5	Buku Tata Kelola Pariwisata-Bencana Dalam Perspektif Collaborative Goernance	(Zaeunuri, Muchamad2016 )	Mendeskrripsikan dan menganalisis kebutuhan dari stakeholder untuk melakukan kolaborasi dalam pengelolaan pariwisata-bencana. Mendeskripsikan dan menganalisis intensitas hubungan antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata-bencana. Mendeskripsikan dan menganalisis proses transformasi kolaborasi antara pemerintah, swasta dan masyarakat pada pengelolaan pariwisata-bencana dalam perspektif collaborative governance. Mendeskripsikan dan

			menganalisis transformasi kolaborasi pariwisata-bencana dalam konteks tahapan pengelolaan bencana mulai dari kondisi normal (mitigation), menjelang terjadinya bencana (response), tanggap darurat (recovery) dan tahap menuju normal (resolution).
6	Buku, Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan (di mulai dari konsep sederhana)	(Asmin, Ferdinal 2014)	Komitmen politik yang kuat untuk mendorong ekowisata sangat diperlukan dalam mengubah paradigma kepariwisataan nasional. Perubahan tersebut harus disesuaikan dengan komponen prinsip ekowisata itu sendiri.
7	Jurnal penelitian tentang, Dampak Pengembangan Ekowisata Kawasan Wisata Gunung Merapai-Merbabu Terhadap Perubahan Struktur Masyarakat	(Wibowo, 2007)	Pengembangan ekowisata dilihat dari perubahan struktur masyarakat, seperti struktur ekonomi adanya pergeseran mata pencarian masyarakat ke suatu yang baru. Sehingga dalam perekonomian tawaran baru pariwisata lebih menghasilkan dari pada bidang pertanian akan tetapi pertanian tetap menjadi hal utama bagi masyarakat. Sedangkan dari sosial orientasi pendidikan menuju ke jenjang yang lebih tinggi karena orang tua mempunyai pendapatan yang lebih sehingga mempunyai kesanggupan yang mapan.
8	Jurnal penelitian tentang, Collaborative Governance Sebagai Inovasi Kebijakan Strategis ( Studi Revitalisasi Kawasan Wisata Cagar Budaya Banten Lama )	(Saruri, 2018)	<i>Collaborative governance</i> yang dilakukan antara Pemerintah Daerah Provinsi Banten dalam revilitalisasi kawasan wisata cagar budaya Banten Lama yang tertuang dalam <i>Memorandum Of Understanding</i> (MOU) masih terdapat berbagai hambatan-hambatan dalam implemtasinya seperti permasalahan relokasi pedagang kaki lima yang belum mau pindah dari kawasan cagar budaya Banten lam ke kawasan penunjang. Belum tercapainya target perencanaan pembangunan infrastruktur dan belum sinerginya kerjasama antara stakholder. Sehingga permasalahan tersebut

			dapat menghambat pengembangan kawasan wilayah dan pembangunan berkelanjutan terhadap revitalisasi kawasan wisata cagar budaya Banten Lama.
9	Jurnal penelitian tentang, Hubungan Antara Nilai Yang Dimiliki Stakeholder Terhadap Pengembangan Kebijakan Ekowisata Pada Taman Nasional Indonesia	(Rhama & Raya, 2018)	Mengetahui tingkatan, dalam hal ini setiap stakeholder yang memiliki Strategi terarah adalah dengan melihat nilai-nilai yang dianut oleh para aktor dan memprediksikan bagaimana para aktor menggunakan nilai untuk membangun persepsi kognitif dan emosional mengenai pesan ekowisata yang dibangun bersama.
10	Jurnal penelitian tentang, Collaborative Governance Dalam Membangun Kawasan Perdesaan ( Tinjauan Konsep dan Regulasi )	(ranggi ade febrin, 2018)	Pembangunan kawasan perdesaan, ditujukan untuk mempercepat proses peningkatan kesejahteraan masyarakat. Konsep <i>Collaborative Governance</i> adalah kurang berjalannya sistem <i>contexs</i> yang dilihat dari kondisi perubahan peraturan perundang-undangan, yang dilihat dari elemen leadership yang sangat mempengaruhi perencanaan pembangunan di desa. Potensi untuk memajukan desa dengan mengkolaborasikan sumber daya yang dimiliki berbagai pihak, dapat dimulai dengan melakukan kolaborasi pada rencana pembangunan dari tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota, dan Pemerintah Desa melalui sebuah konsesus, dalam mencapai tujuan bersama.

Berbagai penelitian tentang collaborative governance sudah banyak dilakukan, di antaranya dilakukan oleh Zaenuri (2016) mengenai tata kelola pariwisata-bencana dalam perspektif *collaborative governance* menjelaskan tentang intensitas hubungan antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat yang mana masih memiliki hubungan yang cenderung bersifat adaptif untuk memenuhi kebutuhan sesaat. Sehingga terjadinya hubungan yang belum menunjukkan adanya kesetaraan diantara stakeholder, dan dominasi pemerintahan masih terlihat dan diperlukan adanya kerjasama yang profesional. Kemudian penelitian Wibowo (2007) tentang dampak pengembangan ekowisata kawasan wisata gunung merapi-merbabu terhadap perubahan struktur masyarakat yang menganalisis bagaimana perkembangan ekowisata terhadap perubahan struktur masyarakat dan ekonomi yang terjadinya pergeseran mata pencarian masyarakat karena munculnya pencarian dibidang pariwisata, dan struktur sosial orientasi pendidikan lebih meningkat dikarenakan pendapatan orang tua membaik daripada sebelumnya.

Kemudian penelitian selanjutnya Rahma (2018) yang menganalisis tentang hubungan antara nilai yang dimiliki stakeholder terhadap pengembangan kebijakan ekowisata pada taman nasional Indonesia, hasil penelitian menunjukkan konsep ekowisata merupakan sebagian salah satu wacana yang umum pada manajemen taman nasional yang mana menekankan pentingnya aspek manusia dalam taman nasional walaupun lebih diarahkan pada masyarakat sebagai sasaran, dan kepentingan

partisipasi. Strategi yang terarah dengan melihat nilai-nilai yang dianut oleh para aktor dan penggunaan nilai-nilai untuk membangun persepsi kognitif dan emosional mengenai pesan ekowisata yang dibangun bersama. Penelitian selanjutnya oleh Febrian (2018) yang menganalisis *collaborative governance* dalam membangun kawasan perdesaan dengan tinjauan konsep dan regulasi, hasil penelitian menerangkan pembangunan kawasan perdesaan ditujukan untuk mempercepat proses peningkatan kesejahteraan masyarakat, dimana konsep *collaborative governance* yang kurang berjalannya sistem yang dilihat dari kondisi perubahan peraturan perundang-undang, dan dinamika kolaborasi yang terjadi yaitu kondisi yang tidak menguntungkan semua pihak sehingga masih terjadi ego sektoral yang mengakibatkan pembangunan kawasan perdesaan belum optimal. Potensi untuk memajukan desa dengan mengkolaborasi sumber daya yang dimiliki berbagai pihak, dapat dimulai dengan melakukan kolaborasi pada rencana pembangunan dari tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota, dan Pemerintah Desa melalui sebuah konsesus, dengan melibatkan berbagai stakeholder yang terkait dengan kepentingan dan potensi masing-masing instansi dalam mencapai tujuan bersama.

Penjelasan dari berbagai penelitian tersebut, diketahui bahwa dalam proses *Collaborative Governance*, dan pengelolaan ekowisata dan wisata yang dilakukan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat dengan berbagai perspektif pemangku kepentingan, lebih dekat dengan masyarakat, dan memperluas kerjasama dengan pihak lain untuk memenuhi kebutuhan

sumber daya, dan perkembangan SDM. Sedangkan penelitian ini akan melihat dan mendeskripsikan pengembangan ekowisata yang berbasis masyarakat, baik dilihat secara *collaborative governance* terhadap stakeholder yang terlibat dalam pengembangan ekowisata Kali Talang Desa Balerante Klaten Jawa Tengah, serta menggali faktor-faktor dalam upaya pengembangan ekowisata Kali Talang Berbasis Masyarakat di Desa Balerante Klaten Jawa Tengah.

## **1.6 Kerangka Dasar Teori**

### **1.6.1 Ekowisata**

Definisi ekowisata yang pertama diperkenalkan oleh organisasi *The Ecotourism Society* pada tahun 1990, Ekowisata (*ecotourism*) adalah suatu bentuk pariwisata yang bertanggung jawab dengan memperhatikan konservasi lingkungan, melestarikan kehidupan dan kesejahteraan penduduk setempat (Chafid Fandeli, 2000:5). Ekowisata juga berarti melibatkan masyarakat setempat dalam proses dan mereka dapat memperoleh keuntungan sosial ekonomi dari proses tersebut. Proses ini juga meliputi petunjuk-petunjuk ketat yang diletakkan oleh berbagai pejabat penguasa sehingga wisatawan yang tiba sekurang-kurangnya membawa pengaruh negatif paling minimal terhadap lingkungan kawasan tersebut (Nyoman S. Pendit, 1990 : 170).

Ekowisata disebutkan di UU No. 9 tahun 1990 pasal 16 sebagai kelompok-kelompok obyek dan daya tarik wisata, yang diperkuat oleh Perpu No. 18 tahun 1994 sebagai perjalanan menikmati gejala keunikan alam di

Taman Nasional, Hutan Raya dan Taman Wisata Alam. Ekowisata harus dapat menjamin kelestarian lingkungan dengan maksud hampir sama dengan konservasi, sebagai berikut :

1. Menjaga tetap berlangsungnya proses ekologis yang tetap mendukung kehidupan.
2. Melindungi keaneka ragaman hayati.
3. Menjamin kelestarian dan pemanfaatan spesies dan ekosistemnya.

(Chafid Fandeli, 2000). Apa yang dimaksud dengan *ecotourism* dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi “ekowisata” yaitu pariwisata yang berwawasan lingkungan. Maksudnya melalui aktivitas yang berkaitan dengan alam, wisatawan diajak melihat alam dengan dekat, menikmati keaslian alam dan lingkungannya sehingga membuatnya tergugah untuk mencintai alam. Pada dasarnya ekowisata dalam penyelenggaraannya dilakukan dengan kesederhanaan, memelihara keaslian alam dan lingkungan, memelihara keaslian seni dan budaya, adat istiadat, kebiasaan hidup, menciptakan ketenangan, kesunyian, memelihara flora dan fauna, serta terpeliharanya lingkungan hidup sehingga tercipta keseimbangan antara kehidupan manusia dan alam sekitarnya.

Tebentuknya ekowisata yang bertujuan dalam hal :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas daya tarik wisata (DTW).
2. Mengkomunikasikan daya tarik wisata (DTW) dengan menggunakan media pemasaran secara efektif, efisien dan bertanggung jawab,

3. Mewujudkan dan menggerakkan perekonomian daerah.
4. Mengembangkan kelompok dan tata kelola masyarakat pariwisata yang mampu mensinergikan semua kepentingan.

### 1.6.2 Stakeholders

Hal pertama mengenai teori *stakeholder* adalah bahwa *stakeholder* merupakan sistem yang berbasis pada pandangan tentang suatu organisasi dan lingkungannya, mengenai sifat saling mempengaruhi antara keduanya yang kompleks dan dinamis. *Stakeholder* dan organisasi saling mempengaruhi, hal ini dapat dilihat dari hubungan sosial keduanya yang berbentuk responsibilitas dan akuntabilitas.

Ramizes dalam bukunya *Cultivating Peace*, mengidentifikasi berbagai pendapat mengenai *stakeholder*. (Freeman dan McVea, 2001) mendefinisikan *stakeholder* sebagai “*any group or individual who can affect or is affected by the achievement of the organization’s objectives.*” Dengan artian sebagai kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh suatu pencapaian tujuan tertentu.

Dalam mengembangkannya (Susanto dan Tarigan, 2013) memperkenalkan konsep *stakeholder* dalam dua model yaitu:

1. Model kebijakan dan perencanaan bisnis.  
fokusnya adalah mengembangkan dan mengevaluasi persetujuan keputusan strategis perusahaan dengan kelompok-kelompok yang dukungannya diperlukan untuk kelangsungan usaha perusahaan. Dapat dikatakan bahwa, dalam model ini, *stakeholder theory* berfokus pada

cara-cara yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengelola hubungan perusahaan dengan *stakeholder*-nya.

2. Model tanggung jawab sosial perusahaan dari manajemen *stakeholder*. Fokusnya adalah perencanaan perusahaan dengan memasukkan pengaruh *eksternal* yang mungkin berlawanan bagi perusahaan. Kelompok-kelompok yang berlawanan ini termasuk badan regulator (*government*) dengan kepentingan khusus yang memiliki kepedulian terhadap permasalahan sosial.

Menurut teori *stakeholders*, manajemen organisasi diharapkan melakukan kegiatan yang dianggap penting oleh *stakeholders*. Teori ini mengatakan bahwa seluruh *stakeholders* mempunyai hak untuk disediakan informasi tentang bagaimana kegiatan organisasi memengaruhi mereka, bahkan mereka memilih untuk tidak menggunakan informasi tersebut dan bahkan ketika mereka tidak bisa secara langsung melakukan peran konstruktif dalam kelangsungan hidup organisasi (Deegan, 2004 dalam Yuniarti, 2007).

Berdasarkan penjelasan tersebut, semakin jelaslah bahwa *stakeholders theory* adalah suatu pendekatan yang didasarkan atas bagaimana mengamati, mengidentifikasi dan menjelaskan secara analitis tentang berbagai unsur yang dijadikan dasar dalam mengambil suatu keputusan dan tindakan dalam menjalankan aktivitas usaha. Pada umumnya hal ini dilakukan sebagai upaya menunjukkan siapa saja yang mempunyai kepentingan, terkait, dan terlibat dalam kegiatan bisnis. Akhirnya tujuan

bisnis akan bermuara pada satu tujuan yang bersifat imperatif. Dalam arti kata bahwa bisnis harus dijalankan sedemikian rupa agar hak dan kepentingan *stakeholders* dengan aktivitas dunia usaha terjamin, diperhatikan dan dihargai (Azheri, 2011).

### **1.6.3 Pengembangan Ekowisata**

Kita menyadari bahwa bila pada suatu daerah tujuan wisata yang berkembang baik dengan sendirinya akan memberikan dampak positif pada daerah itu, karena itu dapat menciptakan lapangan kerja yang cukup luas bagi penduduk sekitar, alasan utama pengembangan pariwisata sangat erat hubungannya dengan pembangunan ekonomi di daerah tempat di mana daerah tujuan wisata itu berada (A.Yoeti, 1997:33).

WWF-Indonesia (2009 Pengembangan ekowisata tidak terlepas dari campur tangan masyarakat dan pada akhirnya masyarakatlah yang akan menikmati hasil dan manfaat dari ekowisata itu sendiri. Adapun beberapa hal yang menjadi daya tarik ekowisata berbasis masyarakat antara lain:

1. Nilai partisipasi masyarakat dan edukasi dimana masyarakat didorong membentuk lembaga untuk mengelola kegiatan ekowisata di daerahnya, dengan dukungan dari pemerintah dan organisasi masyarakat
2. Nilai partisipasi masyarakat dengan prinsip *local ownership* dimana pengelolaan dan kepemilikan dikelola oleh masyarakat setempat terutama untuk sarana dan pra-sarana.

3. Nilai ekonomi dan edukasi dimana homestay menjadi pilihan utama untuk sarana akomodasi di lokasi wisata
4. Nilai ekonomi dan wisata dimana perintisan, pengelolaan dan pemeliharaan obyek wisata menjadi tanggungjawab masyarakat setempat, termasuk penentuan biaya untuk wisatawan.

Pengembangan ekowisata berdasar pada Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS), yaitu Pembangunan kepariwisataan di Indonesia meliputi destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industry pariwisata, dan kelembagaan pariwisata yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS). Dalam peraturan ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan arah pembangunan kepariwisataan nasional dalam kurun waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2025. Visi & Misi pembangunan kepariwisataan nasional yaitu terwujudnya Indonesia sebagai negara tujuan pariwisata berkelas dunia, berdaya saing, berkelanjutan, mampu mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat. Dalam mewujudkan visi ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan kepariwisataan nasional meliputi pengembangan:

1. Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan masyarakat

2. Pemasaran Pariwisata yang sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara.
3. Industri Pariwisata yang berdaya saing, kredibel, menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.
4. Organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya Pembangunan Kepariwisata yang berkelanjutan.

Melakukan strategi pengembangan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan yaitu "*Strategies of Tourism Development through Ecotourism Spectrum for Increasing Tourists' Visit*" (Roedjinandari and Supriadi, 2017) Prinsip dan kriteria pengelolaan ekowisata memiliki standar berupa, kelestarian fungsi ekosistem, kelestarian obyek daya tarik wisata alam, kelestarian sosial budaya, kepuasan pengunjung dan prinsip prinsip manfaat ekonomi. Melakukan strategi dengan dasar hukum rencana induk pengembangan pariwisata dan mencerminkan pada Standar Nasional Pengelolaan Pariwisata Alam dengan pengembangan ekowisata dapat didasarkan enam hal penting seperti :

1. Daya tarik ekowisata.
2. Aksesibilitas.
3. Sarana dan prasarana.
4. Pemasaran.
5. Pengelolaan manajemen.

Pengembangan ekowisata seperti halnya daya tarik ekowisata di suatu daerah wisata yang dapat dikembangkan sehingga dapat menarik para wisatawan untuk berkunjung dengan melihat nilai keunikan alam yang tersedia, keunikan-keunikan budaya setempat yang mengandung unsur-unsur dari pendidikan. Sedangkan di dalam aksesibilitas dalam pengembangan ekowisata mengacu kepada sarana dan prasarana transportasi baik dalam bentuk jalan, lahan parkir, penunjuk arah dan transportasi yang menuju ke objek wisata. Pengembangan dari sarana dan prasarana memperhatikan kepada semua aspek pendukung baik secara sosial, perekonomian dan sarana wisata itu sendiri yang menyangkut semua bentuk-bentuk unsur-unsur alam, air, udara, kehidupan liar didalamnya, bentang alam, pendidikan, keamanan, pengelolaan sampah dan lainnya.

Selanjutnya strategi dalam pengembangan pasar wisatawan. Pasar wisatawan merupakan cakupan segmen wisatawan, baik dalam target pasar wisatawan, kebutuhan wisatawan dan didukung dengan adanya promosi baik secara media dan lainnya. Dalam konteks semua yang terkait dengan pengembangan ekowisata tidak lepas dari pengelolaan dan

manajemen, sebab dalam manajemen pengelolaan sangat mempengaruhi perkembangan baik secara ekonomi sosial dan kesejahteraan masyarakat setempat.

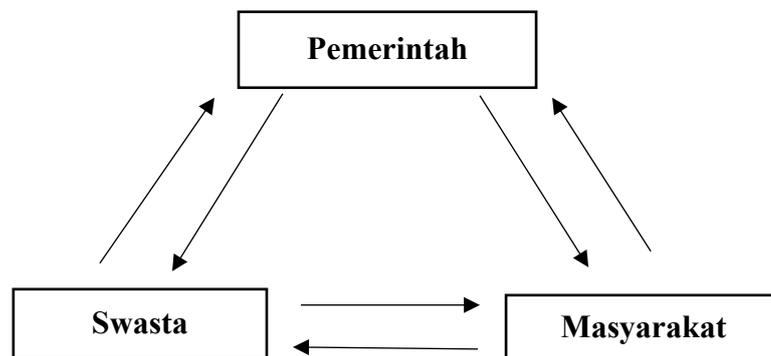
#### **1.6.4 Ekowisata Berbasis Masyarakat**

Sejalan dengan tujuan dan prinsip dalam pengembangan ekowisata, penyelenggaraan dalam penerapannya memiliki keterlibatan *governance* yang mengedepankan prinsip kerjasama baik dalam penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan. Ekowisata memiliki tiga prespektif yaitu produk semua atraksi yang berbasis pada sumberdaya alam, pasar semua perjalanan yang diarahkan pada upaya-upaya pelestarian lingkungan dan pendekatan pengembangan pemanfaatan sumberdaya pariwisata yang bertanggungjawab terhadap kesejahteraan dan pelestarian lingkungan. Ekowisata berbasis masyarakat merupakan pariwisata yang menyadari kelangsungan budaya, sosial, dan lingkungan. Bentuk pariwisata ini dikelola dan dimiliki oleh masyarakat untuk masyarakat, guna membantu para wisatawan untuk meningkatkan kesadaran mereka dan belajar tentang masyarakat dan tata cara hidup masyarakat lokal. Dengan demikian pariwisata berbasiskan masyarakat model pengembangan pariwisata yang berasumsi bahwa pariwisata harus berangkat dari kesadaran nilai-nilai kebutuhan masyarakat sebagai upaya membangun pariwisata yang lebih bermanfaat bagi kebutuhan, inisiatif dan peluang masyarakat lokal (Pinel: 277)

Menurut (Zaeunuri, 2016) meskipun keberadaan *Governance* di ambang-ambang ketidak jelasan dengan dilema yang ada, dimana

*Governance* sebagai bentuk demokrasi, mengamini tidak ada lagi pemain tunggal tetapi dengan berupaya melibatkan berbagai aktor-aktor yang mempunyai hak kepentingan yaitu pemerintah, masyarakat, dan swasta. Namun keberadaan teori dari *Governance* mampu menciptakan sebuah kelarasan yang semakin signifikan dalam mengurus urusan di public. Terlibatnya aktor lain selain negara di urusan publik dengan tujuan jelas bisa menjadikan muncul persoalan tersendiri. Dengan begitu harus ada masalah model partisipasi yang cocok agar nanti kekuatan negara tidak melemah, maka di sini negara harus mampu membangun kerjasama diantara stakeholder sebagai upaya berkelanjutan.

**Bagan 1 : Aktor Governance**



Seperti di bagan atas ketiga aktor itu yaitu Pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan, ketiga aktor tersebut berkolaborasi pada prosesnya, kenyataan dalam penyelenggaraan Governance pemerintah tidak lagi menjadi aktor tunggal yang dominan dalam penyelenggaraan pemerintah. Keterbatasan pemerintah dalam berbagai kemampuan membutuhkan swasta sebagai sarana pendukung dari

aspek finansial yang di harapkan mampu membantu program pemerintah, bukan semata-mata swasta hadir hanya untuk mengurus dirinya dengan mencari keuntungan pribadi. Peran aktor selanjutnya adalah masyarakat dimana masyarakat di harapkan mempunyai peran untuk keterlibatan di dalam proses suatu program yang terselenggara (Rosidi, 2013: 10). Dengan adanya penyelenggaraan wisata yang memprioritas masyarakat setempat maka dalam pengembangan ekowisata juga mempunyai tujuan sebagai pemikat hubungan, atau upaya menjaga hubungan antara stakeholder dengan melihat peran keterlibatannya.

Mencermati dampak positif ekowisata dalam peningkatan daya saing pariwisata sehingga dibutuhkan pengembangan ekowisata daerah yang berbasis masyarakat untuk perbaikan kondisi lingkungan, melakukan upaya konservasi, reboisasi atau penanaman, didalam kawasan ekowisata dan pentingnya infrastruktur ekowisata serta peningkatan *Capacity building* pengelola ekowisata yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan ekowisata.

Pengembangan kawasan ekowisata daerah berbasis masyarakat dapat meliputi :

1. Upaya Perbaikan kondisi lingkungan di kawasan site ekowisata.
2. Upaya konservasi, reboisasi, penanaman di dalam site kawasan ekowisata.
3. Penyiapan Infrastruktur ekowisata.
4. Peningkatan *Capacity building* pengelola ekowisata.
5. Pelibatan masyarakat dalam pembangunan kawasan ekowisata.

## **1.7 Definisi Konseptual**

### **1. Ekowisata**

Ekowisata dalam penelitian ini merupakan suatu usaha dan kegiatan kepariwisataan dengan penyelenggaraan perjalanan ke daerah-daerah lingkungan alam, disertai dengan kesadaran penuh tentang adanya tanggung jawab yang tinggi terhadap pelestarian lingkungan alam dan peningkatan baik dalam ekonomi , sosial dan kesejahteraan penduduk setempat. (Roedjinanndari and Supriadi, 2017) Prinsip dan kriteria pengelolaan ekowisata memiliki standar berupa, kelestarian fungsi ekosistem, kelestarian obyek daya tarik wisata alam, kelestarian sosial budaya, kepuasan pengunjung dan prinsip prinsip manfaat ekonomi.

## **2. Pengembangan ekowisata**

Pengembangan ekowisata sendiri merupakan suatu rangkaian kerja yang bertujuan untuk memberikan dampak positif pada daerah itu, karena itu dapat menciptakan lapangan kerja yang cukup luas bagi penduduk sekitar, alasan utama pengembangan pariwisata sangat erat hubungannya dengan pembangunan ekonomi di daerah tempat di mana daerah tujuan wisata itu berada (A.Yoeti, 1997 :33). Melihat tujuan dari pengembangan wisata itu sendiri, destinasi yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat, pemasaran yang sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara dan industri wisata yang berdaya saing, kredibel, menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya dan melakukan pendampingan masyarakat lokal dengan peningkatan kompetensi pendampingan pemandu wisata lokal sebagai *developers of people*' (Roedjinandari dan Supriadi, 2017)

## **3. Ekowisata Berbasis masyarakat**

Terwujudnya kelompok program pemberdayaan usaha mikro dan kecil Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil melalui program yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan ekonomi masyarakat dengan ber basis sumberdaya lokal seperti potensi kuliner, potensi ekonomi kreatif (Supriadi,

2016). Pengembangan kawasan ekowisata daerah berbasis masyarakat meliputi:

1. Upaya Perbaikan kondisi lingkungan di kawasan obyek ekowisata.
2. Upaya konservasi, reboisasi, penanaman di dalam kawasan ekowisata.
3. Penyiapan Infrastruktur ekowisata.
4. Peningkatan *Capacity building* pengelola ekowisata.
5. Pelibatan masyarakat dalam pembangunan kawasan ekowisata.

Pengembangan yang diharapkan dari Tugas Bantuan Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Ekowisata Berbasis Masyarakat (PPKE-BM) adalah:

1. Terwujudnya kawasan ekowisata yang memiliki daya tarik dan mengedepankan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan
2. Penguatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat lokal dalam mengelola dan mengembangkan kawasan ekowisata.

## **1.8 Defenisi Operasional**

Penggunaan konsep yang dikembangkan *M Nafi, B Supriadi, N Roedjinanndari 2017* dalam penelitian ini dapat melihat dan menggambarkan upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat Desa Balerante dalam mengembangkan Obyek Ekowisata Kali Talang, berdasar pada Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS), yaitu Pembangunan kepariwisataan di Indonesia meliputi destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industry pariwisata, dan kelembagaan pariwisata yang diatur dalam Peraturan

Pemerintah No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS).

Melakukan strategi pengembangan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan yaitu *Strategies of Tourism Development through Ecotourism Spectrum for Increasing Tourists' Visit'* (Nafi, dan Supriadi B, 2017), desain pengembangan ekowisata diawali dengan dasar hukum rencana induk pengembangan pariwisata dan mencerminkan pada Standar Nasional Pengelolaan Pariwisata Alam, selanjutnya pengembangan ekowisata dapat didasarkan pada Instrumen Pengembangan Ekowisata minimal terbagi dalam enam hal penting yaitu daya tarik ekowisata, aksesibilitas, sarana dan prasarana, pemasaran, pengolahan dan spasial. Adapun defenisi operasional dalam penelitian Pengembangan Ekowisata Kali Talang Berbasis Masyarakat di Desa Balerante Klaten Jawa Tengah Tahun 2018 adalah :

**Tabel 1.4 Instrumen Pengembangan Ekowisata**

Variabel	Sub Variabel	Sub-sub Variabel
Daya tarik	Ekowisata	• Nilai Keunikan Alam
		• Nilai Budaya
		• Nilai Unsur pendidikan
Aksesibilitas	Prasarana transportasi	• Jalan
		• Parkir
		• Papan penunjuk jalan
	Sarana transportasi	• Angkutan umum
Sarana dan prasarana	Sarana wisata	• Sarana pokok wisata
		• Sarana pelengkap wisata
		• Sarana pendukung wisata

	Prasarana perekonomian	• Penyediaan air bersih
		• Kelistrikan
		• Pengelolaan sampah
		• Telekomunikasi
	Prasarana sosial	• Pendidikan
		• Kesehatan
		• Keamanan
		• Perbankan
Pasar dan pemasaran	Pasar	• Segmen pasar
		• Lama tinggal wisatawan
		• Kunjungan wisatawan
	Kegiatan promosi	• Jenis kegiatan promosi
		• Pelaku promosi
		• Lingkup wilayah promosi
Pengelolaan/manajemen	Manajemen wisata	• Lembaga pengelola objek wisata
		• Sistem pengelolaan objek wisata

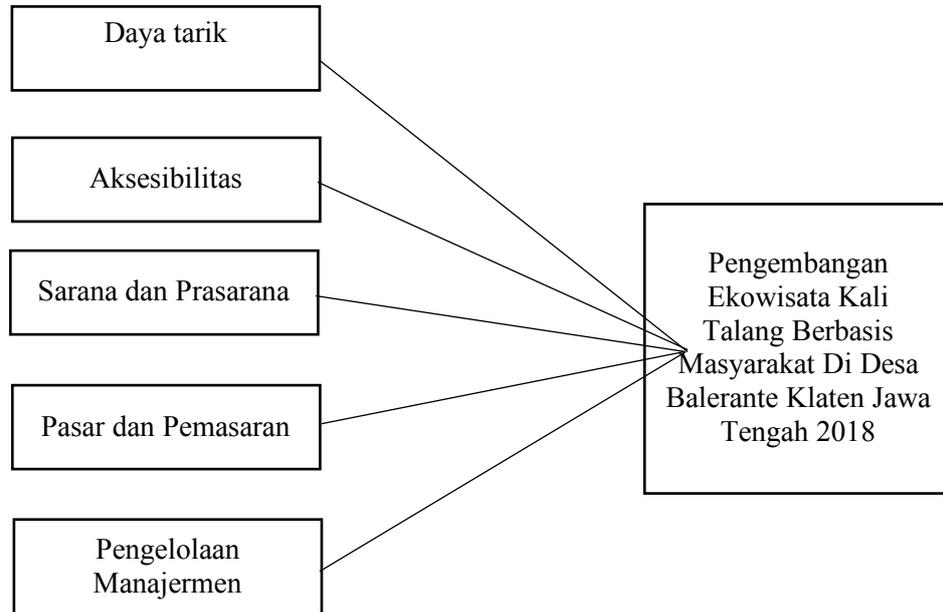
*Sumber : penelitian M Nafi, B Supriadi, N Roedjinanndari 2017*

Data tabel di atas menjelaskan bahwa ekowisata memiliki prespektif yang berbasis pada sumberdaya alam, pasar semua perjalanan yang di arahkan pada upaya-upaya pelestarian lingkungan dan pendekatan pengembangan pemanfaatan sumberdaya pariwisata yang bertanggungjawab terhadap kesejahteraan dan pelestarian lingkungan. Destinasi yang nyaman, aman, menarik, mudah di capai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat, pemasaran yang sinergis, unggul dan bertanggungjawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara dan industri wisata yang berdaya saing.

### **1.8.1 Kerangka Pikir**

Pariwisata sebagai industri dimana semakin berkembangnya dengan dibuktikannya telah banyak pembangunan objek pariwisata di sebagian wilayah Indonesia, dengan tujuan dalam peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerah setempat. Terkait dengan permasalahan perkembangan pariwisata terkadang menyebabkan kerusakan alam yang sangat signifikan. Ekowisata merupakan suatu penjabaran pembangunan berkelanjutan dan suatu usaha kegiatan kepariwisataan dengan penyelenggaraan perjalanan ke daerah-daerah lingkungan alam, disertai dengan kesadaran penuh tentang adanya tanggung jawab yang tinggi terhadap pelestarian lingkungan alam dan peningkatan baik dalam ekonomi, sosial dan kesejahteraan penduduk setempat. Destinasi yang nyaman, aman, menarik, mudah di capai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat, pemasaran yang sinergis, unggul dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara dan industri wisata yang berdaya saing.

## Bagan 2 : Kerangka pikir pengembangan Ekowisata



Pengembangan Ekowisata yang dapat dilihat dari keterlibatan peran ketiga pilar *governance* (Masyarakat, Pemerintah, Swasta) baik dalam daya tarik, aksesibilitas, sarana dan prasarana, pasar dan pemasaran, pengelolaan atau manajemen, dan spasial sehingga dapat menunjang pengembangan ekowisata berbasis masyarakat di Desa Balerante Klaten Jawa Tengah dan dalam penerapan visi bersama maka semakin menumbuhkan partisipasi yang tinggi. Partisipasi dapat menumbuhkan *democratic governance* yang melibatkan masyarakat luas dari segala lapisan untuk menentukan agenda-agenda publik.

## **1.9 Metode Penelitian**

### **1.9.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam menganalisis tentang Pengembangan Ekowisata Kali Talang Berbasis masyarakat Di Desa Balerante Klaten Jawa Tengah Tahun 2018 adalah Kualitatif Deskriptif. Menurut Sugiyono (2015:14) Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang berisikan data berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar.

Selain itu menurut Arikunto (2006:16) mengatakan bahwasanya penelitian kualitatif adalah penelitian yang mengutamakan proses dari pada hasil. Sementara deskriptif memiliki pengertian penggambaran secara menyeluruh. Maka pada hakikatnya penelitian kualitatif deskriptif lebih menekankan pada penggambaran bagaimana proses masalah itu muncul berdasarkan data yang ada di lokasi penelitian.

### **1.9.2 Unit Analisis**

Unit analisis merupakan satuan yang dijadikan sebagai obyek penelitian yang berkaitan dengan sesuatu yang akan diteliti. Unit analisa dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Balerante, kelompok dalam pengelolaan ekowisata Kali Talang, pihak swasta dan pemerintah desa. Pihak-pihak Penentuan unit analisa ini berdasarkan pertimbangan obyektif untuk mendeskripsikan penelitian mengenai Pengembangan Ekowisata Kali Talang Berbasis masyarakat Di Desa Balerante Klaten Jawa Tengah Tahun 2018.

### **1.9.3 Jenis Data**

Menurut Loftland (dalam Sakir, 2013) menyebutkan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya merupakan data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Primer dan data Sekunder.

#### **a) Data Primer**

Data primer menurut (Hasan, 2002) adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung di lapangan. Metode ini yang akan digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data yang diperlukan. Data yang diambil secara langsung oleh peneliti dari obyek yang berhubungan langsung dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Data primer dalam penelitian ini adalah mengenai Pengembangan Ekowisata Kali Talang Berbasis masyarakat Di Desa Balerante Klaten Jawa Tengah Tahun 2018 yang diambil melalui proses wawancara dan dokumentasi langsung kepada unit analisa penelitian.

**Tabel 1.5 Data Primer**

No.	Data Primer	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
1.	Peran Pemerintah dalam pengembangan ekowisata berbasis masyarakat	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Olahraga Kabupaten Kkatén.</li><li>• Pemerintah Desa Balerante.</li></ul>	Wawancara
2.	Peran Masyarakat dalam pengembangan ekowisata berbasis masyarakat	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pok Darwis Desa Balerante.</li><li>• Pengunjung Obyek Wisata Kali Talang</li></ul>	Wawancara

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari serta memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen (Sugiyono, 2014). Data sekunder dapat diperoleh melalui website, buku, skripsi, atau jurnal dari penelitian sebelumnya atau penelitian lainnya. Peneliti dalam hal ini menggunakan data sekunder dari dokumentasi website, jurnal dan berita online yang terkait.

**Tabel 1.6 Data Sekunder**

No.	Data Sekunder	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
1.	Bentuk pengelolaan ekowisata Kali Talang	Website Desa	Dokumentasi
2.	Faktor-faktor pendukung dalam pengembangan ekowisata Kali Talang	Jurnal,buku, Website Desa	Dokumentasi

#### **1.9.4 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan strategi yang digunakan dalam proses pengumpulan data dan informasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a) Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan seseorang untuk memperoleh informasi dan keterangan secara lisan dari seseorang responden, dengan cara berbicara langsung bertatap muka dengan responden (Koentjaraningrat dalam Hartadi, 2017). Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dengan pedoman umum yang telah dipersiapkan sesuai dengan tema penelitian. Dalam penelitian ini akan melakukan wawancara langsung kepada objek penelitian yang berjumlah 5 responden.

b) Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dokumentasi merupakan teknik pengambilan data dengan menggunakan berbagai dokumen atau catatan yang mencatat keadaan konsep penelitian dalam unit analisa yang dijadikan sebagai obyek penelitian (Rahmawati dan Dian Eka dalam Hartadi, 2017).

### **1.9.5 Teknik Analisis Data**

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah data menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Bog dan Biklen dalam Moeleong, 2014). Adapun proses dalam teknik analisa data dalaam penelitian ini terdiri dari tiga langkah yaitu:

a) Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, abstraksi dan transformasi data kasar yang diperoleh di lapangan studi (Salim, 2006). Teknik reduksi data dilakukan untuk memilih data yang relevan dan sesuai dengan fokus penelitian sehingga pertanyaan dapat terjawab dengan baik.

b) Penyaji Data

Penyajian data yaitu deskripsi kumpulan informasi tersusun yang memungkinkan untuk melakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan (Salim, 2006).

c) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mencari makna dari setiap gejala yang diperolehnya di lapangan, mencatat keteraturan atau pola penjelasan dan konfigurasi yang mungkin ada, alur kausalitas, dan proposisi. Tahap penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari proses analisis data. Pada penarikan kesimpulan ini peneliti menarik kesimpulan terhadap data yang diperoleh yang telah direduksi dalam bentuk laporan dengan cara membandingkan, menghubungkan, dan memilah data yang mengarah kepada permasalahan serta menjawab permasalahan yang ada sehingga menghasilkan kesimpulan yang valid (Hartadi, 2017).